

Kajian Taktik dan Strategi Partai Aceh dalam Meraih Kemenangan DPRA pada Pemilu 2024

Nofriadi¹, Syahrul Ramadhan^{2*}, Ihda Altaqwadinur³, Farid Ardiansyah⁴, Bunga Adellya⁵, Nadiatul Ulfah⁶, Siska Yunita⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷ Universitas Syiah Kuala

ABSTRACT	CONTACT
<i>This study aims to analyze the strategies implemented by Partai Aceh in their efforts to achieve victory in the Aceh People's Representative Council (DPRA) in the 2024 elections. Using a qualitative approach, this research involves in-depth interviews with party elites, political observers, and voters in Aceh. Secondary data from various sources such as media, party documents, and previous election reports were also used to strengthen the analysis. The research results show that Partai Aceh employs various strategies, including strengthening support bases among the local community, increasing youth involvement in politics, and utilizing social media for more effective campaigns. Additionally, the party focuses on regional issues and economic empowerment as their main campaign platforms. The implementation of these strategies is expected to increase the electability and the number of seats obtained by Partai Aceh in the DPRA in the 2024 elections. This study concludes that the success of Partai Aceh is significantly influenced by their ability to adapt to local political dynamics and understand the needs and aspirations of the Acehnese people.</i>	syhrldmhn.271003@gmail.com
ABSTRAK	KEYWORDS
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan Partai Aceh dalam upaya meraih kemenangan di DPRA pada Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada elite partai, pengamat politik, dan pemilih di Aceh. Untuk memperkuat analisis, digunakan data sekunder dari berbagai sumber seperti media, dokumen partai, dan laporan pemilu sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Aceh menggunakan berbagai strategi, antara lain memperkuat basis dukungan di kalangan masyarakat setempat, meningkatkan keterlibatan pemuda dalam politik, dan memanfaatkan media sosial untuk kampanye yang lebih efektif. Selain itu, partai ini berfokus pada isu daerah dan pemberdayaan ekonomi sebagai platform kampanye utama. Penerapan strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan elektabilitas dan perolehan kursi Partai Aceh di DPRA pada Pemilu 2024. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Partai Aceh sangat dipengaruhi oleh kemampuannya beradaptasi dengan dinamika politik lokal dan memahami kebutuhan serta aspirasi masyarakat Aceh.	Strategy, Partai Aceh, Pemilu 2024, DPRA, Kampanye Politik, Aceh
	Received: 06/06/2024 Revised: 07/07/2024 Accepted: 15/07/2024 Online: 31/10/2024 Published: 31/10/2024
	Al-ijtima'i is licenced under a Creative Commons Attribution Share-Alike Public Licence (CC-BY-SA)

INTRODUCTION

Hukum sebagai seperangkat aturan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, hukum terus dipertanyakan oleh pergeseran sosial yang dinamis yang terjadi dalam konteks kehidupan pribadi, sosial, dan politik masyarakat serta keberadaan negara (Alhuda, 2022; Hidayat & Wahyuningsih, 2018). Kata "politik" menggambarkan berbagai inisiatif atau upaya yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil dan tertib (Solihin, 2021). Dalam politik manusia, kepentingan komunitas lokal dan nasional selalu diutamakan. Desentralisasi merupakan bagian dari pelaksanaan desentralisasi yang mengarah pada pemerintahan daerah. Kehadirannya menjadi prasyarat penting bagi proses demokrasi dan perluasan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik. Tanpa struktur pemerintah daerah, tidak mungkin ada sistem politik yang demokratis dan ideal. Dengan diperkenalkannya sistem desentralisasi (otonomi daerah), kekuasaan pengelolaan pemerintah pusat juga telah beralih atau dialihkan ke pemerintah daerah (Mertokusumo & Liberty, 2007).

Peranan terpenting dalam suatu negara yang demokrasi adalah adanya partai politik dan pemilihan umum (pemilu) yang dilakukan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi (Amaritasari, 2017; Kustiawan et al., 2022). Partai politik berfungsi sebagai alat sosialisasi atau penghubung antara tujuan masyarakat dengan hak dan tuntutan mereka kepada pemerintah. Sekali lagi, provinsi Aceh telah menciptakan sejarah (Efriza, 2018). Pemilu legislatif 2024, yang menampilkan partai politik nasional dan lokal, kali ini berhasil diselenggarakan (Devi et al., 2024). Terselenggaranya agenda demokratis ini di wilayah yang dijuluki "Serambi Mekah" menarik perhatian dari berbagai kalangan karena partai lokal (parlok) untuk pertama kalinya ikut berkontestasi dalam sejarah politik Indonesia.

Pemilu merupakan mekanisme politik untuk menggantikan kepemimpinan yang diikhtirakan menyegarkan kembali moralitas dan komitmen kerakyatan. Cara berpartisipasi paling efektif dalam sistem demokrasi perwakilan modern adalah melalui pemilihan umum. Tiga syarat harus dipenuhi agar sebuah pemilu dapat dikatakan "bermakna": transparan, akurat, dan sukses (Awalia & Riwanto, 2023; Jonsaa et al., 2020). Sistem pemilihan merupakan alat penting untuk memahami tujuan pemilu. Di sinilah terlihat betapa pentingnya pengendalian pemilu bagi proses demokrasi suatu negara. Penyelenggaraan pemilu yang adil, jujur, dan demokratis ditentukan oleh sejumlah faktor regulasi dan kebijakan terkait penyelenggaraan pemilu (Pulungan et al., 2020).

Sebanyak 24 partai politik di Aceh yang bersaing memperebutkan kursi parlemen, baik tingkat nasional maupun kabupaten/kota. Keragaman yang besar akan terjadi di parlemen Aceh dalam 5 tahun ke depan, sehingga pemilu 2024 memberikan ciri khas khusus mengenai kondisi parlemen di tingkat tersebut. Hal ini karena adanya partai lokal Aceh atau parlok yang bisa berkompetisi di level nasional. Kondisi ini sangat berbeda dari representasi DPR dan DPRD tingkat kabupaten di provinsi lain di Indonesia.

Partai politik lokal Aceh lahir sebagai hasil dari kompromi politik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan tujuan mencapai perdamaian di provinsi tersebut (Marzaniar, 2022). Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memutuskan untuk menghentikan penggunaan kekerasan dalam konflik mereka dan mengakui kelegitimasan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai cara untuk mencapai resolusi damai. Selama bertahun-tahun, masyarakat Aceh telah menderita akibat perang militer yang berkepanjangan, sehingga keberhasilan penyelesaian politik ini patut dipuji. Konflik Aceh dikatakan telah terselesaikan berkat langkah-langkah kompromi yang disepakati dan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta reputasi positif negara. Para pemimpin GAM tidak lagi dapat mendukung pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia karena dibentuknya partai politik lokal sebagai hasil dari Perjanjian Damai Helsinki (Aminah, 2017; Marzaniar, 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh merupakan peraturan yang khusus mengatur tentang keberadaan dan pembentukan partai politik lokal di Provinsi Aceh. Partai politik lokal tersebut hanya dapat berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di wilayah Aceh. Dasar pembentukan peraturan ini adalah dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk membentuk partai politik lokal di Aceh sebagai bagian dari kebijakan keistimewaan Aceh.

Partai politik lokal di Aceh memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan partai politik nasional dalam kegiatan politik di Aceh. Mereka dapat mengajukan calon kepala daerah dan calon anggota DPRD Aceh serta kabupaten/kota di Aceh (Jonsaa et al., 2020). Namun, partai politik lokal ini hanya boleh beroperasi di wilayah Aceh saja dan tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 ini mengatur syarat-syarat pembentukan partai politik lokal di Aceh, seperti jumlah pendiri, kepengurusan, sumber pendanaan, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk menjamin partai politik lokal di Aceh dapat berpartisipasi secara demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Aceh (Jonsaa et al., 2020).

Dapil	Perolehan Suara Partai Aceh	Persentase
Aceh 1	19.315	8,7%
Aceh 2	7.579	25,16%
Aceh 3	23.753	22,06%
Aceh 4	11.823	8,85%
Aceh 5	37.244	35,47%
Aceh 6	16.785	32,08%
Aceh 7	16.863	10,93%

Aceh 8	9.429	11,73%
Aceh 9	21.354	8,3%
Aceh 10	24.078	20,29%

Tabel 1. Hasil Perolehan Suara Partai Aceh Pemilu 2024

Sumber: Real Count KPU_Suara Partai Aceh di 10 Dapil

Suara masuk real count KPU untuk DPR Aceh (DPRA) mencapai 51,63%. Partai Aceh yang masih menjadi penguasa di DPR Aceh (DPRA) meraih suara tertinggi di tujuh dari 10 daerah pemilihan (Dapil). Data yang masuk ke real count KPU untuk DPR Aceh di situs pemilu 2024 kpu.go.id pukul 20.00 WIB adalah 8.284 dari 16.046 TPS (51,63%). Secara umum, suara yang dikantongi Partai Aceh jauh berbeda dengan partai lain. Partai yang diketuai mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu mendulang 188.261 suara (14,92%). Sementara di posisi kedua, Golkar bersaing ketat dengan PKB. Golkar mengantongi 108.995 suara (8,64%), dan PKB 105.608 suara (8,37%). Sementara partai dengan suara terbanyak keempat adalah NasDem yakni 91.265 (7,23%). Untuk diketahui, di DPR Aceh terdapat empat kursi pimpinan yaitu satu ketua dan tiga orang wakil ketua. Kembali ke Partai Aceh, partai bentukan mantan kombatan GAM itu meraih suara terbanyak di tujuh daerah pemilihan. Hanya tiga dapil yang suara partai itu tidak dominan yakni dapil Aceh 4, dapil Aceh 8 dan 9 (detik.com, 2024).

METHODS

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti melalui pengumpulan data yang tidak terstruktur atau semi-terstruktur. Dalam hal ini, studi kasus Partai Aceh akan menjadi fokus utama, dengan eksplorasi mendalam mengenai strategi yang mereka terapkan. Peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara mendalam dengan anggota partai, analisis dokumen partai, dan observasi langsung. Wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh kunci dalam Partai Aceh, seperti pimpinan partai, anggota DPRA, dan konsultan politik, akan memberikan wawasan tentang perencanaan dan implementasi strategi kampanye mereka. Analisis dokumen internal partai, seperti rencana kampanye, laporan rapat, dan materi kampanye, akan membantu memahami detail teknis dari strategi yang digunakan.

Tahap-tahap Penelitian ini meliputi: (a) mengumpulkan bahan penelitian: peneliti mulai mengumpulkan data dari berbagai sumber. Wawancara dengan anggota Partai Aceh, dan analisis politik juga dilakukan untuk mendapatkan perspektif kualitatif. Selain itu, data sekunder dari laporan pemilu sebelumnya dan statistik demografi juga dikumpulkan. (b) membuat catatan penelitian : Proses membuat catatan penelitian adalah langkah penting yang membantu peneliti mengorganisir informasi, mencatat perkembangan, dan menyimpan data secara sistematis. (c) mengolah catatan penelitian : Mengolah data penelitian adalah tahapan kritis yang melibatkan serangkaian proses yang dirancang untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat dianalisis dengan tepat dan menghasilkan temuan yang valid serta reliabel.

RESULTS

Strategi Partai Aceh Dalam Pemilu 2024

Strategi adalah sarana Bersama dengan tujuan jangka Panjang yang hendak dicapai (David 2011). Strategi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan perusahaan dan menciptakan keunggulan untuk bersaing. Didalam politik strategi sangat dibutuhkan tentang bagaimana proses yang terjadi didalam kemenangan satu pertarungan politik oleh partai politik. Partai Aceh sendiri memiliki berbagai strategi dalam meraih kemenangan pemilu di tahun 2024. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada Dr. Nurlis Effendi, S.H., M.H, selaku wakil ketua DPP partai aceh, mengatakan;

"Bahwa ada 4 (empat) strategi yang diterapkan oleh partai aceh yang dilakukan untuk mengikuti segala pemilu, Pertama, kearifan lokal yang mana Partai Aceh ini sendiri berdiri tidak lepas dengan sejarah aceh maka semua kader di Partai Aceh sangat ditekankan untuk memiliki sifat karekteristik yang tegas dan kearifan local. Kedua, semua kader Partai Aceh harus memiliki sifat karekteristik yang lugas jadi ketika kadernya kampanye tidak ambigu

dan bisa merangkul masyarakat untuk memilih partai aceh dalam parlemen, Kader Partai Aceh juga menekankan tidak terpengaruh dengan bujukan negatif yang dilontarkan oleh masyarakat malahan Partai Aceh sendiri menekankan bahwasanya bujukan negatif tersebut menjadi cermin mereka untuk kedepannya lebih baik. Ketiga, membuat pembaharuan di Partai Aceh yang mana mereka membuka peluang besar bagi masyarakat yang ingin masuk ke Partai Aceh dibuka pintu selebar-lebarnya untuk berkarir di dunia politik. Dan yang keempat, perubahan SDM yang mana Partai Aceh membuka rekrutmen akademisi yang mana ketika akademisi ini kedalam Partai Aceh dapat membuat perubahan di Partai Aceh ini sendiri” Wawancara Strategi Partai Aceh.”

Pada intinya, hal terpenting yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan ideal adalah memulai dari komponen yang akan membantumu mencapai tujuan tersebut dengan paling cepat: sumber daya manusia (SDM). Akibatnya, diperlukan kegiatan manajemen dan pengembangan yang ditargetkan untuk menghasilkan SDM yang produktif. Ketika manajemen dan pengembangan SDM dilakukan dengan baik, karyawan akan lebih siap untuk menangani dan memenuhi tuntutan tugas saat ini dan masa depan.

Dalam pengertian luas, istilah "sumber daya manusia" (SDM) merujuk pada semua individu yang berada dalam usia produktif dan merupakan penduduk suatu negara atau tinggal di wilayah geografis tertentu, terlepas dari apakah mereka memiliki akses untuk mendapatkan pekerjaan atau tidak. Lebih jauh lagi, SDM secara makroskopis juga merujuk pada populasi dalam rentang usia produktif, meskipun beberapa orang belum memasuki pasar tenaga kerja di budaya mereka dan belum menjadi produktif karena berbagai alasan dan/atau masalah.

Sumber daya manusia dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain-lain. Unsur-unsur sumber daya terbagi menjadi kedalam beberapa bagian diantaranya yaitu : Men (Manusia), Money (Uang), Methode (Metode), Materials (Material), Machine (Mesin), Market (Pasar), Indormation (Informasi). Dengan demikian, sumber daya manusia merupakan bagian integral dari kelompok sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan organisasi secara efektif (Berliana, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Dr. Nurlis Effendi, S.H, M.H, selaku Wakil Ketua DPP Partai Aceh.

“Partai Aceh memiliki strategi khusus dalam meningkatkan kualitas SDM yaitu mereka membuka perekrutan terhadap akademisi bertujuan untuk kolaborasi yang mana akademisi ini dapat memberikan pelatihan terhadap kader-kader Partai Aceh yang baru mengenal dunia perpolitikan. Dalam peningkatan Kualitas SDM, Partai Aceh menyuruh kader-kader yang pola pikirnya masih biasa-biasa saja diharapkan untuk melanjutkan pendidikan kuliah lagi agar seluruh kader politik Aceh memiliki kemampuan pendidikan yang sama”.

Fokus Kebijakan Partai Aceh di Parlemen

Berdasarkan pernyataan dari Dr. Nurlis Effendi, S.H., M.H. selaku wakil ketua DPP Partai Aceh mengatakan Fokus kebijakan Partai Aceh di parlemen adalah Memfokuskan point-point kebijakan yang mensejahterakan masyarakat aceh, Apapun konsep yang dibuat mengarah pada kesejahteraan masyarakat bukan mempermiskin masyarakat. Membangun pondasi regulasi yang mana membangun ekonomi masyarakat dari hasil bumi aceh. Disamping itu tetap mempertahankan kearifan lokal dan ciri khas partai aceh.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Partai Aceh merupakan sebuah partai politik yang memiliki visi untuk mensejahterakan masyarakat Aceh melalui kebijakan-kebijakan yang diusungnya di parlemen. Setiap konsep dan program yang dirancang oleh partai ini selalu mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh, bukan sebaliknya yang justru mempermiskin masyarakat. Salah satu fokus utama Partai Aceh adalah membangun fondasi regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi hasil bumi Aceh. Mereka berkomitmen untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki daerah ini dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

Namun, di samping fokus pada pembangunan ekonomi, Partai Aceh juga menekankan pentingnya mempertahankan kearifan lokal dan ciri khas partai sebagai wujud pelestarian budaya dan identitas Aceh. Mereka berupaya untuk menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Dengan demikian, Partai Aceh berusaha untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat Aceh. Mereka berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kearifan lokal dan ciri khas partai sebagai identitas Aceh.

CONCLUSIONS

Kemenangan di DPRA dalam Pemilu 2024 mencerminkan tekad dan keyakinan yang kuat dari Partai Aceh dalam menghadapi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tahun 2024. Dengan strategi mereka yang ampuh, Partai Aceh menunjukkan bahwa mereka telah mengembangkan rencana yang matang dan efektif untuk memenangkan posisi parlemen. Dalam konteks politik lokal Aceh, pemilihan DPRA memegang peranan krusial dalam menentukan arah kebijakan daerah, kesimpulan dari judul ini adalah bahwa Partai Aceh telah melakukan persiapan yang matang dan memiliki tekad yang kuat untuk memenangkan pemilihan DPRA tahun 2024, dengan keyakinan pada strategi politik yang mereka terapkan.

Dengan menekankan tujuan kemenangan dalam pemilu DPRA tahun 2024, Partai Aceh menegaskan komitmennya untuk meraih posisi parlemen yang kuat di tingkat daerah. Dengan demikian, mencerminkan ambisi partai tersebut untuk mengonsolidasikan kekuatan politiknya di Aceh, dan memanfaatkan kemenangan dalam pemilihan DPRA sebagai batu loncatan untuk mewujudkan agenda politik mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Partai Aceh tidak hanya fokus pada pemilihan nasional, tetapi juga memiliki kesadaran yang kuat akan pentingnya dominasi politik di tingkat regional untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka.

Dalam mengejar kemenangan di DPRA, Partai Aceh kemungkinan telah melakukan serangkaian langkah strategis. Ini mungkin termasuk mengidentifikasi isu-isu kunci yang penting bagi pemilih Aceh, membangun jaringan dukungan yang kuat di tingkat lokal, dan menyusun pesan kampanye yang resonan dengan aspirasi masyarakat Aceh. Selain itu, kemungkinan Partai Aceh juga melakukan analisis mendalam terhadap potensi pesaing politiknya, serta mempersiapkan strategi untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang mungkin muncul selama kampanye. Dengan demikian, kesimpulan akhir dari judul tersebut adalah bahwa Partai Aceh telah melakukan persiapan yang komprehensif dan berkomitmen sepenuhnya untuk meraih kemenangan dalam pemilihan DPRA 2024, dengan harapan membawa perubahan positif bagi Aceh melalui peran politik yang mereka dapatkan.

REFERENCES

- Alhuda, B. (2022). Efektivitas Gakkumdu dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum. In *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES*. <https://doi.org/10.19184/ij.v3i2.34546>
- Amaritasari, I. P. (2017). Keamanan Nasional dalam Konteks Isu-isu Global Kontemporer: Sebuah Tinjauan Hubungan Internasional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 3(1), 109–132. <https://doi.org/10.31599/jkn.v3i1.19>
- Aminah, A. (2017). Tambang Rakyat Rentan Konflik (Studi Kasus Pertambangan Emas Rakyat Di Gunong Ujeun Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Public Policy*. <http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/123>
- Awalia, F., & Riwanto, A. (2023). EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM MENGAWASI PROSES KAMPANYE PADA PILKADA SERENTAK 2018 DI POLEWALI MANDAR. In *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*. <https://doi.org/10.20961/respublica.v7i2.51156>
- Berliana, N. (2021). Landasan Teori *البدع*. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 3, 17–39.
- Devi, S., Yazid, T. P., & Marta, A. (2024). Political Marketing Syahrul Aidi Mazaat pada Pemilu DPR RI Tahun 2024 Dapil Riau II. In *Jurnal Ilmiah Komunikasi (JIKOM) STIKOM IMA*. <https://doi.org/10.33221/jikom1.v16i03.392>
- Efriza, E. (2018). Koalisi Dan Pengelolaan Koalisi, Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. *Populis*:

- Jurnal Sosial Dan Humaniora*. <https://journal.unas.ac.id/populis/article/view/470>
- Hidayat, A., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Role of Prosecutor General Prosecution of Actors in the Implementation of Abuse of Narcotics Crime (Case Study in Magelang District Attorney). *Jurnal Daulat Hukum*, 1(2), 445–452. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i2.3290>
- Jonsaa, A., Sandi, K., Sawina, S., Salam, R., & Umar, T. (2020). Strategi Partai Aceh Dalam Memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2017 Di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 2(1), 119–138. <https://doi.org/10.33701/jpp.v2i1.1638>
- Kustiawan, W., Ramadhani, K. R., Damanik, S. V., & Muharramsyah, A. (2022). PENGARUH IKLAN POLITIK DALAM MENGAMBIL ASPIRASI RAKYAT. In *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i8.178>
- Marzaniar, P. (2022). RESOLUSI KONFLIK DI ASIA (Analisis Perbandingan Aceh dan Sri Langka). *AL-IJTIMA'I: International Journal of Government and Social Science*, 8(1), 57–68.
- Mertokusumo, S., & Liberty, M. H. (2007). *Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Liberty*, Yogyakarta, 2002, *bal. 1 Maria Farida Indrati S, 2007, Ilmu Perundang-Undangan I, Kanisius, Yogyakarta, bal. 18.*
- Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansyah, A. G. (2020). Strategi KPU Kota Bekasi dalam meningkatkan Partisipatif Pemilih Disabilitas. *Jurnal Politik Islam*, 3(2), 251–272.
- Solihin, M. (2021). FOTOGRAFI SEBAGAI MEDIA POLITIK DI INDONESIA. In *MASSIVE: Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.35842/massive.v1i1.18>